



2026

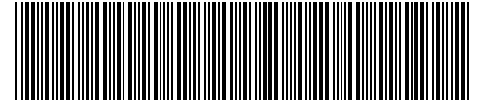
DOKUMEN DIPA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANGKA BELITUNG**





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692032/2026**



DS:2165-5016-1323-6448

Revisi ke 01

Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 3. Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
 4. Kode>Nama Satker : (692032) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Sebesar : Rp. 15.751.115.000 (LIMA BELAS MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU JUTA SERATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.01.WA Program Dukungan Manajemen
135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang
Rp. 15.751.115.000
Rp. 15.751.115.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.751.115.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 15.751.115.000

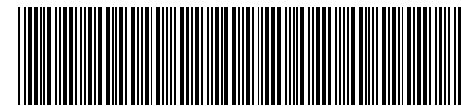
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692032/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2165-5016-1323-6448

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692032) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			15.751.115.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			15.751.115.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Perkara	8.679.402.000
Rincian Output	:	01	EBA.001 Layanan Kerja Sama	1,00	Layanan	145.621.000
		02	EBA.959 Layanan Protokoler	1,00	Layanan	88.968.000
		03	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	101.534.000
		04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	8.329.420.000
		05	EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	6.492.000
		06	EBA.Z07 Layanan BMN	1,00	Layanan	7.367.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	72,00	Unit, m2, Paket	6.881.965.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	71,00	Unit	1.229.429.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	5.652.536.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	72,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.009.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	72,00	Orang	83.009.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Layanan, Rekomendasi	106.739.000
Rincian Output	:	01	EBD.001 Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1,00	Layanan	50.399.000
		02	EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,00	Rekomendasi	8.092.000
		03	EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Layanan	12.746.000
		04	EBD.Z32 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Layanan	19.739.000
		05	EBD.Z34 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Layanan	6.620.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692032/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2165-5016-1323-6448

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692032) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 2

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Layanan, Rekomendasi		
06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	9.143.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692032/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2165-5016-1323-6448

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692032) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692032	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5.554.073	3.315.077	6.881.965	-	-	15.751.115		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.554.073	3.315.077	6.881.965	-	-	15.751.115		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	5.554.073	3.315.077	6.881.965	-	-	15.751.115		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	5.554.073	3.125.329	-	-	-	8.679.402	30 . 51	
01	RM	5.554.073	3.125.329	-	-	-	8.679.402	015	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	-	6.881.965	-	-	6.881.965	30 . 51	
01	RM	-	-	6.881.965	-	-	6.881.965	015	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	83.009	-	-	-	83.009	30 . 51	
01	RM	-	83.009	-	-	-	83.009	015	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692032/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2165-5016-1323-6448

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692032) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	106.739	-	-	-	106.739	30 . 51	
01 RM		-	106.739	-	-	-	106.739	015	
JUMLAH		5.554.073	3.315.077	6.881.965	-	-	15.751.115		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692032/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2165-5016-1323-6448

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692032) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

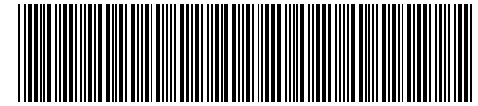
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692032	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	654.900	664.208	3.737.555	681.290	676.230	2.474.416	673.631	668.965	2.073.316	674.332	678.818	2.093.454	15.751.115
		BELANJA PEGAWAI	393.217	393.206	811.001	393.206	393.206	786.411	393.206	393.206	393.206	393.206	393.206	417.796	5.554.073
		BELANJA BARANG	261.683	271.002	283.991	288.084	283.024	274.871	280.425	275.759	266.976	281.126	285.612	262.524	3.315.077
		BELANJA MODAL	0	0	2.642.563	0	0	1.413.134	0	0	1.413.134	0	0	1.413.134	6.881.965
	135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	654.900	664.208	3.737.555	681.290	676.230	2.474.416	673.631	668.965	2.073.316	674.332	678.818	2.093.454	15.751.115
		51 BELANJA PEGAWAI	393.217	393.206	811.001	393.206	393.206	786.411	393.206	393.206	393.206	393.206	393.206	417.796	5.554.073
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	261.683	271.002	283.991	288.084	283.024	274.871	280.425	275.759	266.976	281.126	285.612	262.524	3.315.077
		53 BELANJA MODAL	0	0	2.642.563	0	0	1.413.134	0	0	1.413.134	0	0	1.413.134	6.881.965

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692032/2026
IV A. B L O K I R**



DS:2165-5016-1323-6448

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [692032] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692032/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:2165-5016-1323-6448

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [692032] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

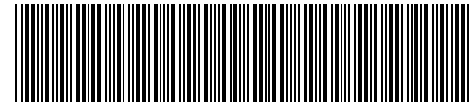
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692032	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	Rp. 5.652.536		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Rehabilitasi Gedung Kantor dan Luasan 1560m2 5652536000		
	Rp. 5.652.536		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692072/2026**



DS:2031-5259-0609-7212

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01

Tanggal : 27 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 3. Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
 4. Kode>Nama Satker : (692072) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Sebesar : Rp. 1.396.776.000 (SATU MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.396.776.000
Rp. 1.396.776.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 1.396.776.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 1.396.776.000

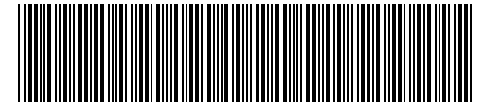
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692072/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2031-5259-0609-7212

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692072) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

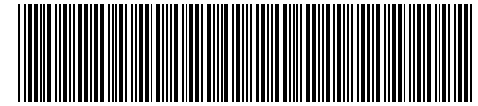
Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.396.776.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			1.396.776.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan	845.776.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	845.776.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	1.000.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara	1.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3,00	Lembaga	500.000.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	3,00	Lembaga	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	50.000.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1,00	Laporan	50.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692072/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



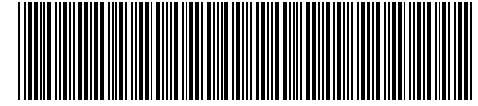
DS:2031-5259-0609-7212

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692072) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692072	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	1.396.776	-	-	-	1.396.776		
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.396.776	-	-	-	1.396.776		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.396.776	-	-	-	1.396.776		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	845.776	-	-	-	845.776	30 . 51	
04	PNBP	-	845.776	-	-	-	845.776	015@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	1.000	-	-	-	1.000	30 . 51	
04	PNBP	-	1.000	-	-	-	1.000	015@	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	500.000	-	-	-	500.000	30 . 51	
04	PNBP	-	500.000	-	-	-	500.000	015@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692072/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2031-5259-0609-7212

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692072) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	50.000	-	-	-	50.000	30 . 51	
04	PNBP	-	50.000	-	-	-	50.000	015@	
JUMLAH		-	1.396.776	-	-	-	1.396.776		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692072/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2031-5259-0609-7212

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (692072) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

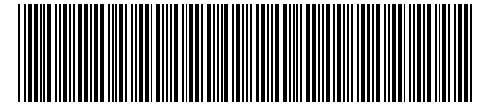
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692072	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	120.000	170.000	100.000	110.000	200.000	150.000	150.000	200.000	70.000	75.000	51.776	1.396.776
		BELANJA BARANG	0	120.000	170.000	100.000	110.000	200.000	150.000	150.000	200.000	70.000	75.000	51.776	1.396.776
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	120.000	170.000	100.000	110.000	200.000	150.000	150.000	200.000	70.000	75.000	51.776	1.396.776
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	120.000	170.000	100.000	110.000	200.000	150.000	150.000	200.000	70.000	75.000	51.776	1.396.776

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692072/2026
IV A. B L O K I R**



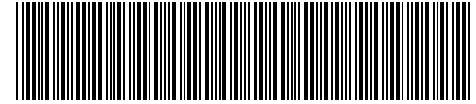
DS:2031-5259-0609-7212

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [692072] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692072	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 533.738		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 533.738	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.160
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.069		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.957
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.400		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 501
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.400		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.332
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.460		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 139.350
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 89.190		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.148
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 102.732		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692072/2026
IV A. B L O K I R**



DS:2031-5259-0609-7212

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [692072] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.140 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.322 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.577 Halaman IV.A DIPA (Blokir) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692072/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:2031-5259-0609-7212

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [692072] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

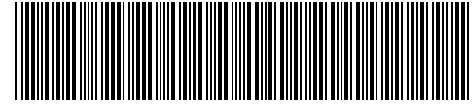
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693018/2026**



DS:9371-3933-6515-5888

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
3. Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
4. Kode>Nama Satker : (693018) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Sebesar : Rp. 1.991.041.000 (SATU MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

	Jumlah Uang
135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.991.041.000
135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.991.041.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	1.991.041.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 1.991.041.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693018/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9371-3933-6515-5888

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693018) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.991.041.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			1.991.041.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani			
		2. 01	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di Wilayah terhadap Standar Pelayanan			
		3. 01	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	150,00	orang	60.000.000
Rincian Output	:	01 AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual	150,00	orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	1.610.696.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1,00	layanan	927.420.000
		02 BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1,00	layanan	683.276.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik	2,00	dokumen, Peta, Data	320.345.000
Rincian Output	:	01 BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah	2,00	Data	320.345.000

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

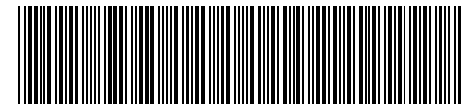
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.05.2.693018/2026

I B. SUMBER DANA



DS:9371-3933-6515-5888

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
 Kode>Nama Satker : (693018) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

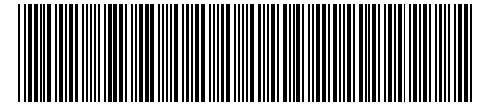
Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.991.041.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693018/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9371-3933-6515-5888

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693018) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

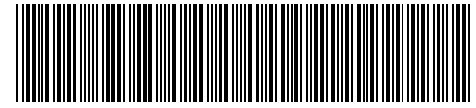
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693018	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	1.991.041	-	-	-	1.991.041		
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.991.041	-	-	-	1.991.041		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	1.991.041	-	-	-	1.991.041		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	60.000	-	-	-	60.000	30 . 51	
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000	015	
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	1.610.696	-	-	-	1.610.696	30 . 51	
04	PNBP	-	1.610.696	-	-	-	1.610.696	015	
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	320.345	-	-	-	320.345	30 . 51	
04	PNBP	-	320.345	-	-	-	320.345	015	
JUMLAH		-	1.991.041	-	-	-	1.991.041		

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693018/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9371-3933-6515-5888

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693018) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

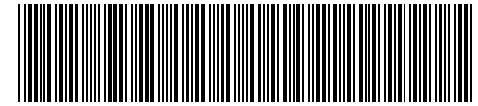
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693018	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	55.000	243.500	199.718	249.239	340.187	269.092	186.050	183.012	150.498	111.440	3.305	1.991.041
		BELANJA BARANG	0	55.000	243.500	199.718	249.239	340.187	269.092	186.050	183.012	150.498	111.440	3.305	1.991.041
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	55.000	243.500	199.718	249.239	340.187	269.092	186.050	183.012	150.498	111.440	3.305	1.991.041
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	55.000	243.500	199.718	249.239	340.187	269.092	186.050	183.012	150.498	111.440	3.305	1.991.041

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693018/2026
IV A. B L O K I R**



DS:9371-3933-6515-5888

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [693018] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693018/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:9371-3933-6515-5888

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [693018] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
MENTERI HUKUM

ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693052/2026**



DS:6409-1295-2401-7060

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01

Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 3. Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
 4. Kode/Nama Satker : (693052) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Sebesar : Rp. 217.466.000 (DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	217.466.000
Rp.	217.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	217.466.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 217.466.000

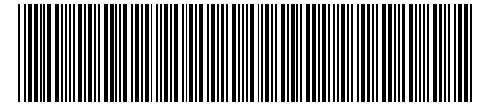
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693052/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6409-1295-2401-7060

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693052) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi			217.466.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			217.466.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	70,00	Rekomendasi Kebijakan	175.701.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah	70,00	Rekomendasi Kebijakan	175.701.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	35.271.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah	1,00	Lembaga	35.271.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	6.494.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1,00	Laporan	6.494.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.03.2.693052/2026

I B. SUMBER DANA



DS:6409-1295-2401-7060

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
 Kode>Nama Satker : (693052) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I B. 1

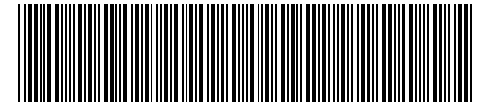
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	217.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	217.466.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693052/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6409-1295-2401-7060

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693052) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

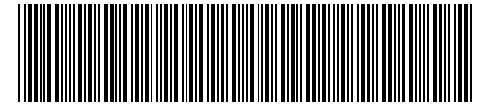
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693052	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	217.466	-	-	-	217.466		
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	217.466	-	-	-	217.466		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	217.466	-	-	-	217.466		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	175.701	-	-	-	175.701	30 . 51	
01	RM	-	175.701	-	-	-	175.701	015	
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	35.271	-	-	-	35.271	30 . 51	
01	RM	-	35.271	-	-	-	35.271	015	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	6.494	-	-	-	6.494	30 . 51	
01	RM	-	6.494	-	-	-	6.494	015	
JUMLAH		-	217.466	-	-	-	217.466		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693052/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6409-1295-2401-7060

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693052) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

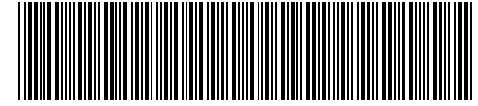
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693052	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	15.294	23.000	18.472	21.000	20.500	24.500	20.400	20.100	17.100	22.100	15.000	217.466
		BELANJA BARANG	0	15.294	23.000	18.472	21.000	20.500	24.500	20.400	20.100	17.100	22.100	15.000	217.466
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	15.294	23.000	18.472	21.000	20.500	24.500	20.400	20.100	17.100	22.100	15.000	217.466
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	15.294	23.000	18.472	21.000	20.500	24.500	20.400	20.100	17.100	22.100	15.000	217.466

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693052/2026
IV A. B L O K I R**



DS:6409-1295-2401-7060

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [693052] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

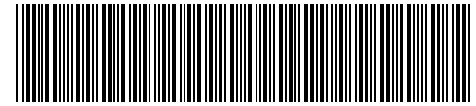
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

tt.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693052/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:6409-1295-2401-7060

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [693052] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

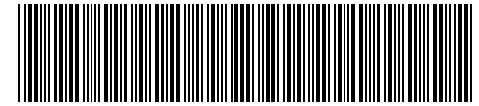
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693120/2026**



DS:0342-0387-1818-6900

Revisi ke 01

Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (135) | KEMENTERIAN HUKUM |
| 2. Unit Organisasi | : (11) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (30) | KEP. BANGKA BELITUNG |
| 4. Kode/Nama Satker | : (693120) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| Sebesar | : Rp. 807.600.000 | (DELAPAN RATUS TUJUH JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	807.600.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 807.600.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026



DS:0342-0387-1818-6900

Satker : (693120) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	24.497.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	24.497.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	783.103.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	783.103.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693120) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			24.497.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah			24.497.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	24.497.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	24.497.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			783.103.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			783.103.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10,00	Lembaga	24.758.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDH di wilayah	10,00	Lembaga	24.758.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300,00	Orang	41.971.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah	300,00	Orang	41.971.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	10,00	Lembaga	30.812.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah	10,00	Lembaga	30.812.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	8.914.000
Rincian Output	:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1,00	Data	8.914.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693120) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		82,00	Orang	524.800.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	82,00	Orang	524.800.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		10,00	Kelompok Masyarakat	85.360.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	10,00	Kelompok Masyarakat	85.360.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	66.488.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	(PN)	1,00	Lembaga	66.488.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026

I B. SUMBER DANA



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
 Kode>Nama Satker : (693120) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	807.600.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	807.600.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693120) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693120	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	807.600	-	-	-	807.600		
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	24.497	-	-	-	24.497		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	24.497	-	-	-	24.497		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	24.497	-	-	-	24.497	30.51	
01	RM	-	24.497	-	-	-	24.497	015	
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	783.103	-	-	-	783.103		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	783.103	-	-	-	783.103		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	24.758	-	-	-	24.758	30.51	
01	RM	-	24.758	-	-	-	24.758	015	
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	41.971	-	-	-	41.971	30.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693120) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	41.971	-	-	-	41.971	015	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	30.812	-	-	-	30.812	30 . 51	
01 RM		-	30.812	-	-	-	30.812	015	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	8.914	-	-	-	8.914	30 . 51	
01 RM		-	8.914	-	-	-	8.914	015	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	524.800	-	-	-	524.800	30 . 51	
01 RM		-	524.800	-	-	-	524.800	015	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	85.360	-	-	-	85.360	30 . 51	
01 RM		-	85.360	-	-	-	85.360	015	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693120) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

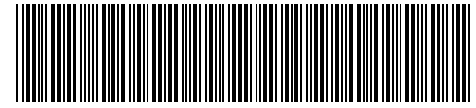
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	66.488	-	-	-	66.488	30 . 51	
01 RM		-	66.488	-	-	-	66.488	015	
JUMLAH		-	807.600	-	-	-	807.600		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693120) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693120	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	81	87.462	87.462	87.462	87.462	110.002	93.962	88.462	74.502	38.541	37.541	14.661	807.600
		BELANJA BARANG	81	87.462	87.462	87.462	87.462	110.002	93.962	88.462	74.502	38.541	37.541	14.661	807.600
	135.11.BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	81	2.962	2.962	2.962	2.962	2.002	2.962	2.962	2.002	1.041	1.041	558	24.497
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	81	2.962	2.962	2.962	2.962	2.002	2.962	2.962	2.002	1.041	1.041	558	24.497
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	84.500	84.500	84.500	84.500	108.000	91.000	85.500	72.500	37.500	36.500	14.103	783.103
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	84.500	84.500	84.500	84.500	108.000	91.000	85.500	72.500	37.500	36.500	14.103	783.103

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026
IV A. B L O K I R**



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [693120] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693120/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:0342-0387-1818-6900

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [693120] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693154/2026**



DS:3783-3158-3211-5046

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01

Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
4. Kode>Nama Satker : (693154) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Sebesar : Rp. 69.510.000 (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.12.WA Program Dukungan Manajemen
135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 69.510.000
Rp. 69.510.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	69.510.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 69.510.000

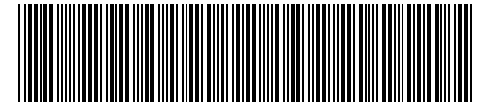
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693154/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3783-3158-3211-5046

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693154) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen			69.510.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			69.510.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2,00	Rekomendasi Kebijakan	62.748.000
Rincian Output	:	01	ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	2.00	Rekomendasi Kebijakan	62.748.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	100,00	orang	6.762.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01 Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	100.00	orang	6.762.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

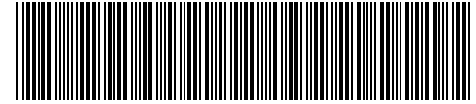
ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.12.2.693154/2026

I B. SUMBER DANA



DS:3783-3158-3211-5046

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
 Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
 Kode>Nama Satker : (693154) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		Rp.	69.510.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2026		Rp.	69.510.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693154/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3783-3158-3211-5046

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693154) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693154	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	69.510	-	-	-	69.510		
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	69.510	-	-	-	69.510		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	69.510	-	-	-	69.510		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	62.748	-	-	-	62.748	30 . 51	
01	RM	-	62.748	-	-	-	62.748	015	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	6.762	-	-	-	6.762	30 . 51	
01	RM	-	6.762	-	-	-	6.762	015	
JUMLAH		-	69.510	-	-	-	69.510		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693154/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3783-3158-3211-5046

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (693154) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

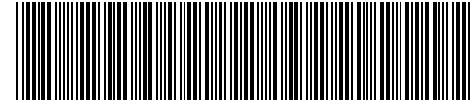
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693154	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	13.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.958	6.762	0	69.510
		BELANJA BARANG	0	0	13.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.958	6.762	0	69.510
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	0	13.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.958	6.762	0	69.510
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	13.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.958	6.762	0	69.510

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693154/2026
IV A. B L O K I R**



DS:3783-3158-3211-5046

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [693154] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693154/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:3783-3158-3211-5046

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [693154] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

